

# Analisis Hubungan Ketimpangan Regional Di Indonesia : Sebelum Dan Setelah Pandemi

Bagus Muldiansyah<sup>1</sup>, Muhammad Irfan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

\*Korespondensi: [bagusmuldiansyah1@gmail.com](mailto:bagusmuldiansyah1@gmail.com) , [irfan.muhammad@fe.unp.ac.id](mailto:irfan.muhammad@fe.unp.ac.id)

---

## Info Artikel

### Diterima:

04 Mei 2026

### Disetujui:

18 Juni 2026

### Terbit daring:

15 Juli 2026

### DOI: -

## Sitasi:

Muldiansyah, B. & Irfan, M. (2026). Analisis Hubungan Ketimpangan Regional di Indonesia: Sebelum dan Setelah Pandemi

## Abstract:

*This study aims to analyze the level of regional and human development inequality between provinces in Indonesia and examine the relationship between the two before, during, and after the COVID-19 pandemic. The variables used include per capita income (GRDP), education (average years of schooling), unemployment (open unemployment rate), and health (percentage of the population with health complaints). This study uses secondary data from the (BPS) covering 34 provinces in 2015, 2020, and 2024. The analytical method used is descriptive analysis with the Coefficient of Variation (CV) to measure the level of inequality, as well as inferential analysis using the Wilcoxon Signed Rank Test and correlation analysis. The results show that regional development inequality in terms of income tends to decrease relatively. Human development inequality in education indicators shows a decline, indicating equity, while inequality in health indicators tends to increase, and inequality in unemployment decreases with the post-pandemic economic recovery. Inferential test results show significant differences before and after the pandemic, as well as a relationship between income inequality and human development. This study concludes that the pandemic has had a different impact on each dimension of inequality, necessitating more inclusive and equitable development policies to reduce disparities between regions in Indonesia.*

**Keywords:** regional inequality, human development, GRDP, education, unemployment

## Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan wilayah dan pembangunan manusia antar provinsi di Indonesia serta mengkaji hubungan keduanya sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19. Variabel yang digunakan meliputi pendapatan per kapita (PDRB), pendidikan (rata-rata lama sekolah), pengangguran (tingkat pengangguran terbuka), dan kesehatan (persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan). Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan cakupan 34 provinsi pada tahun 2015, 2020, dan 2024. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan Koefisien Variasi (CV) untuk mengukur tingkat ketimpangan, serta analisis inferensial menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test dan analisis korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah dari sisi pendapatan cenderung menurun secara relatif. Ketimpangan pembangunan manusia pada indikator pendidikan menunjukkan penurunan yang mengindikasikan pemerataan, sementara ketimpangan kesehatan cenderung meningkat, dan ketimpangan pengangguran mengalami penurunan seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hasil uji inferensial menunjukkan adanya perbedaan signifikan sebelum dan sesudah pandemi serta adanya hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pembangunan manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandemi memberikan dampak berbeda pada tiap dimensi ketimpangan, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan merata untuk mengurangi disparitas antar wilayah di Indonesia.

**Kata kunci:** ketimpangan regional, pembangunan manusia, PDRB, pendidikan, pengangguran

**Kode Klasifikasi JEL:** D31, O15, R11

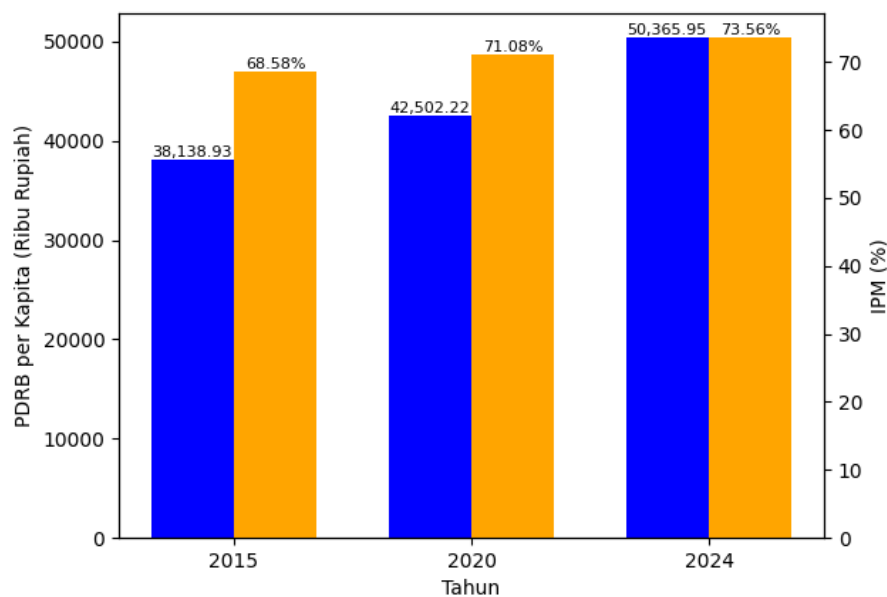
---

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari tingkat pemerataan hasil pembangunan antar wilayah. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan pembangunan masih menjadi isu yang penting, baik dari sisi ekonomi maupun pembangunan manusia. Ketimpangan tersebut tercermin dari perbedaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita serta disparitas Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) antar provinsi. Pembangunan yang tidak merata menunjukkan bahwa tidak semua wilayah memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, sehingga menimbulkan kesenjangan kesejahteraan antar wilayah.

Perkembangan kondisi pembangunan di Indonesia dapat dilihat melalui perbandingan PDRB per kapita dan IPM pada tahun 2015, 2020, dan 2024. Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa secara umum terjadi peningkatan pada kedua indikator tersebut dari waktu ke waktu. Pada tahun 2015, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp35.161 ribu dengan IPM sebesar 69,55%. Memasuki tahun 2020, meskipun terjadi pandemi COVID-19, PDRB per kapita meningkat menjadi Rp39.778 ribu dan IPM menjadi 71,94%. Selanjutnya, pada tahun 2024, peningkatan yang lebih signifikan terjadi dengan PDRB per kapita mencapai Rp45.881 ribu dan IPM sebesar 74,20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara agregat pembangunan di Indonesia mengalami kemajuan, bahkan setelah menghadapi tekanan akibat pandemi. Namun demikian, peningkatan tersebut belum tentu mencerminkan pemerataan, karena masih terdapat perbedaan capaian yang cukup besar antar provinsi.



Sumber: BPS (2015,2020 dan 2024)

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika pembangunan regional di Indonesia. Dampak pandemi tidak hanya dirasakan dalam bentuk perlambatan ekonomi, tetapi juga memengaruhi sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Wilayah dengan struktur ekonomi yang kuat dan infrastruktur yang memadai cenderung lebih mampu bertahan dan pulih, sedangkan wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya mengalami tekanan yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pandemi berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Ketimpangan pembangunan wilayah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan pembangunan manusia. Dalam penelitian ini, ketimpangan pembangunan wilayah diukur melalui pendapatan per kapita yang direpresentasikan oleh PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu wilayah, karena menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk. Semakin tinggi PDRB per kapita, maka semakin besar pula kemampuan ekonomi suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Namun, perbedaan nilai PDRB per kapita antar provinsi menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan wilayah yang masih terjadi di Indonesia.

Sementara itu, pembangunan manusia dalam penelitian ini dilihat melalui tiga indikator utama, yaitu pendidikan, pengangguran, dan kesehatan. Pendidikan, yang mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan penduduk. Pendidikan merupakan faktor

penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula produktivitas dan peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, ketimpangan dalam pendidikan akan berdampak pada ketimpangan pembangunan manusia antar wilayah.

Pengangguran yang menunjukkan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran mencerminkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat. Ketimpangan tingkat pengangguran antar wilayah menunjukkan adanya perbedaan kesempatan kerja dan struktur ekonomi, yang turut memperlebar kesenjangan pembangunan.

Selanjutnya, Kesehatan merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan manusia, karena individu yang sehat memiliki kemampuan kerja dan produktivitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, rendahnya tingkat kesehatan akan menurunkan produktivitas tenaga kerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ketimpangan dalam aspek kesehatan juga berkontribusi terhadap ketimpangan pembangunan manusia antar wilayah.

Secara teoritis, ketimpangan regional dapat dijelaskan melalui teori kausasi kumulatif yang dikemukakan oleh Myrdal (1957), yang menyatakan bahwa pembangunan cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu akibat dominasi *backwash effect* dibandingkan *spread effect*. Selain itu, hipotesis Kuznets (1957 dalam Tambunan, 2003) menjelaskan bahwa ketimpangan akan meningkat pada tahap awal pembangunan dan menurun pada tahap selanjutnya. Dalam perspektif pembangunan manusia, teori *human capital* yang dikemukakan oleh Becker (1964) menekankan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan regional di Indonesia masih tergolong tinggi. (Akita, 2010) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan antar provinsi bersifat persisten, sementara (Akita, 2015) Akita et al., (2015) menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan manusia juga masih signifikan. Penelitian oleh Candrawati et al., (2024) mengungkapkan bahwa disparitas pembangunan antar daerah masih terjadi meskipun terdapat kecenderungan penurunan pada beberapa indikator. Selain itu, (Syarifullah, 2025) menunjukkan bahwa ketimpangan kualitas sumber daya manusia masih terlihat pada indikator pendidikan dan kesehatan.

Ketimpangan pembangunan wilayah yang tercermin melalui PDRB per kapita merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dan kinerja ekonomi antar wilayah di Indonesia. Perbedaan nilai PDRB per kapita antar provinsi tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi daerah, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pembangunan yang dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Dalam kondisi ketidakpastian yang dipengaruhi oleh dinamika global serta dampak pandemi COVID-19, diperlukan kajian empiris yang mampu menjelaskan faktor-faktor utama yang memengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah secara komprehensif. Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya mengukur ketimpangan dari sisi ekonomi, tetapi juga mengaitkannya dengan pembangunan manusia melalui indikator pendidikan, pengangguran, dan kesehatan secara simultan.

Meskipun penelitian mengenai ketimpangan regional di Indonesia telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada ketimpangan ekonomi atau pembangunan manusia secara terpisah. Penelitian Akita dan Miyata (2010), misalnya, lebih menitikberatkan pada ketimpangan pendapatan antarprovinsi, sedangkan Akita et al. (2015) lebih berfokus pada ketimpangan pembangunan manusia. Penelitian-penelitian lainnya juga umumnya hanya menggunakan indikator tertentu serta belum membandingkan kondisi sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19 secara komprehensif. Selain itu, sebagian penelitian masih terbatas pada wilayah tertentu sehingga belum memberikan gambaran ketimpangan regional secara nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis ketimpangan pembangunan wilayah dan pembangunan manusia melalui indikator PDRB per kapita, rata-rata lama sekolah, tingkat

pengangguran terbuka, dan tingkat keluhan kesehatan pada seluruh provinsi di Indonesia dalam tiga periode pengamatan, yaitu sebelum pandemi (2015), saat pandemi (2020), dan pascapandemi (2024). Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai dinamika ketimpangan regional di Indonesia serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan wilayah dari sisi pendapatan, mengukur ketimpangan pembangunan manusia berdasarkan indikator pendidikan, pengangguran, dan kesehatan, serta mengkaji hubungan dan perbedaan ketimpangan tersebut sebelum dan setelah pandemi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam memperkaya kajian ekonomi pembangunan, khususnya terkait ketimpangan regional, serta memberikan kontribusi praktis sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan wilayah serta hubungan antara ketimpangan pembangunan wilayah dan pembangunan manusia di Indonesia sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19. Kerangka pikir penelitian ini didasarkan pada keterkaitan antara ketimpangan ekonomi yang diukur melalui PDRB per kapita dengan ketimpangan pembangunan manusia yang direpresentasikan oleh indikator pendidikan, pengangguran, dan kesehatan. Dalam kerangka tersebut, diasumsikan bahwa perbedaan kualitas sumber daya manusia antar wilayah akan memengaruhi perbedaan tingkat pendapatan, dan sebaliknya ketimpangan ekonomi juga dapat memengaruhi kualitas pembangunan manusia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk kuantitatif yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan mencakup 34 provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2015, 2020, dan 2024, yang merepresentasikan kondisi sebelum pandemi, saat pandemi, dan setelah pandemi. Variabel yang dianalisis meliputi PDRB per kapita sebagai indikator pembangunan wilayah, rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai indikator pendidikan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebagai indikator pengangguran, serta persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebagai indikator kesehatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengakses dan mengunduh data dari publikasi resmi BPS serta sumber relevan lainnya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi rata-rata, nilai maksimum, minimum, serta tingkat penyebaran data melalui standar deviasi. Untuk mengukur tingkat ketimpangan antar wilayah digunakan Koefisien Variasi (*Coefficient of Variation/CV*), yang dihitung dari perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata masing-masing variabel. Semakin besar nilai CV, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan antar wilayah. Selanjutnya, analisis inferensial dilakukan untuk menguji perbedaan dan hubungan antar variabel. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji *Shapiro-Wilk* untuk menentukan apakah data berdistribusi normal. Apabila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji non-parametrik yaitu *Wilcoxon Signed Rank Test* untuk menguji perbedaan sebelum dan sesudah pandemi. Selain itu, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan pembangunan wilayah dan ketimpangan pembangunan manusia. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan satuan yang sesuai dengan indikator masing-masing, yaitu PDRB per kapita dalam ribu rupiah, pendidikan dalam tahun, pengangguran dalam persentase, dan kesehatan dalam persentase. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika ketimpangan regional di Indonesia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2015 rata-rata sebesar 38.138,93 dengan nilai minimum 11.087,91 dan maksimum 142.913,61 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antar provinsi. Hal ini diperkuat oleh standar deviasi sebesar 29.199,61 dan koefisien variasi 0,7656 yang mengindikasikan ketimpangan antar wilayah masih tinggi sebelum pandemi. Pada tahun 2020, rata-rata meningkat menjadi 42.502,22 dengan nilai minimum 12.960,95 dan maksimum 170.089,02. Meskipun terjadi peningkatan secara agregat, kenaikan yang tidak merata menyebabkan standar deviasi meningkat menjadi 31.735,52, sementara koefisien variasi sedikit menurun menjadi 0,7467. Hal ini menunjukkan bahwa selama pandemi, ketimpangan antar wilayah masih terjadi akibat perbedaan kemampuan adaptasi masing-masing provinsi. Selanjutnya, pada tahun 2024 rata-rata kembali meningkat menjadi 50.365,95 dengan nilai minimum 13.798,45 dan maksimum 201.315,13. Standar deviasi meningkat menjadi 37.184,22 dan koefisien variasi menurun menjadi 0,7383, yang mengindikasikan bahwa meskipun terjadi pemulihan ekonomi, ketimpangan antar wilayah masih tetap ada karena pertumbuhan yang tidak merata.

Tabel 1. PDRB PerKapita di Indonesia (Ribuan Rupiah)

Tahun	Average	Min	Max	STDV	CV
2015	38138,93	11087,91	142913,61	29199,61	0,7656
2020	42502,22	12960,95	170089,02	31735,52	0,7467
2024	50365,95	13798,45	201315,13	37184,22	0,7383

Sumber: Hasil Olahan Excel, 2026

Berdasarkan Tabel 2, pada tahun 2015 rata-rata pendidikan sebesar 8,52 dengan nilai minimum 6,27 dan maksimum 10,9. Standar deviasi sebesar 0,89 dan koefisien variasi 0,1047 menunjukkan bahwa variasi antar provinsi relatif rendah. Pada tahun 2020, rata-rata meningkat menjadi 9,08 dengan standar deviasi menurun menjadi 0,82 dan ketimpangan menjadi 0,0903, yang mengindikasikan pemerataan pendidikan semakin baik. Selanjutnya, pada tahun 2024 rata-rata kembali meningkat menjadi 9,48 dengan standar deviasi 0,74 dan ketimpangan 0,0784, yang menunjukkan bahwa akses dan pemerataan pendidikan terus membaik pascapandemi. Pada indikator pengangguran, tahun 2015 menunjukkan rata-rata sebesar 11,11 dengan ketimpangan 0,3433 yang mencerminkan variasi antar provinsi cukup tinggi. Tahun 2020 rata-rata menurun menjadi 10,50 dengan ketimpangan 0,3167, yang menunjukkan variasi mulai berkurang. Pada tahun 2024, rata-rata kembali menurun menjadi 8,92 dengan ketimpangan 0,2863, yang mengindikasikan tidak hanya penurunan tingkat pengangguran, tetapi juga semakin meratanya kondisi pasar tenaga kerja antar wilayah.

Sementara itu, pada indikator kesehatan, tahun 2015 menunjukkan rata-rata sebesar 56,86 dengan ketimpangan 0,2112 yang mencerminkan adanya variasi antar provinsi. Pada tahun 2020, ketimpangan meningkat menjadi 0,2178, yang menunjukkan kesenjangan semakin melebar akibat tekanan pandemi terhadap sistem kesehatan. Pada tahun 2024, rata-rata menurun menjadi 49,65 dengan ketimpangan meningkat menjadi 0,2298, yang mengindikasikan bahwa meskipun terjadi perubahan kondisi kesehatan, pemulihan antar wilayah belum merata dan kesenjangan masih cenderung meningkat.

Tabel 2. Pendidikan, pengangguran dan kesehatan di Indonesia

Variabel	Tahun	Average	Min	Max	STDV	CV
Pendidikan	2015	8,52	6,27	10,9	0,89	0,1047
	2020	9,08	6,96	11,17	0,82	0,0903
	2024	9,48	8,28	11,49	0,74	0,0784

Variabel	Tahun	Average	Min	Max	STDV	CV
Pengangguran	2015	11,11	3,36	18,13	3,81	0,3433
	2020	10,50	5,71	18,63	3,32	0,3167
	2024	8,92	3,66	13,70	2,55	0,2863
Kesehatan	2015	56,86	33,45	79,15	12,01	0,2112
	2020	56,23	32,00	87,89	12,25	0,2178
	2024	49,65	26,46	77,73	11,41	0,2298

Sumber: Hasil Olahan Excel, 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas, tidak seluruh variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal pada setiap tahun pengamatan. Oleh karena itu, untuk analisis perbedaan digunakan Wilcoxon Signed Rank Test sebagai alternatif nonparametrik. Selanjutnya, untuk analisis hubungan antar variabel digunakan uji korelasi Spearman, karena metode ini tidak mensyaratkan data berdistribusi normal dan sesuai digunakan pada data penelitian yang tidak seluruhnya memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3. Hasil Uji Wilcoxon Sebelum dan Setelah Pandemi

No	Variabel	Nilai Z	Sig	Keterangan
1	PDRB Perkapita	- 5,086	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
2	Pendidikan	- 5,087	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
3	Pengangguran	-4,145	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
4	Kesehatan	-4,026	0,000	Terdapat perbedaan signifikan

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test pada Tabel 3, seluruh variabel penelitian yaitu PDRB per kapita, pendidikan, pengangguran, dan kesehatan memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kondisi sebelum pandemi (2015) dan sesudah pandemi (2024). Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi COVID-19 dan proses pemulihan memberikan dampak terhadap perubahan ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia.

Secara parsial, PDRB per kapita menunjukkan perubahan signifikan ( $Z = -5,086$ ) yang mencerminkan perbedaan kemampuan pemulihan ekonomi antar daerah. Pendidikan ( $Z = -5,087$ ) juga mengalami perubahan akibat perbedaan akses dan kesiapan pembelajaran selama pandemi. Pengangguran ( $Z = -4,145$ ) menunjukkan perbedaan signifikan yang dipengaruhi oleh ketidakmerataan pemulihan pasar tenaga kerja. Sementara itu, kesehatan ( $Z = -4,026$ ) mengalami perubahan signifikan akibat perbedaan kapasitas layanan kesehatan antar wilayah. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa dampak pandemi tidak merata dan berkontribusi terhadap perubahan ketimpangan antar provinsi.

Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman pada Tabel 4, hubungan antara ketimpangan pendapatan (PDRB per kapita) dan pembangunan manusia menunjukkan perbedaan antara sebelum pandemi (2015) dan sesudah pandemi (2024). Pada tahun 2015, hubungan PDRB per kapita dengan pendidikan, pengangguran, dan kesehatan tergolong rendah dan tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan belum memiliki keterkaitan yang kuat dengan pembangunan manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum pandemi, faktor non-ekonomi seperti kebijakan pemerintah dan distribusi layanan masih berperan dominan.

Pada tahun 2024, hubungan tersebut mengalami perubahan. PDRB per kapita memiliki hubungan positif dan signifikan dengan pendidikan (koefisien 0,448), serta hubungan negatif dan signifikan dengan kesehatan (koefisien -0,446), yang menunjukkan bahwa daerah dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki kondisi pendidikan yang lebih baik dan

ketimpangan kesehatan yang lebih rendah. Sementara itu, hubungan dengan pengangguran tetap rendah dan tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa pemulihan pasar tenaga kerja belum merata antar wilayah.

Tabel 4. Hasil Uji Korelasi

No	Periode	Hubungan	Koefisien	Sig	Ket
1	2015	PDRB Perkapita Pendidikan	- 0,325	0,061	Tidak Signifikan
		PDRB Perkapita Pengangguran	- 0,201	0,255	Tidak Signifikan
		PDRB Perkapita Kesehatan	- - 0,282	0,106	Tidak Signifikan
		PDRB Perkapita Pendidikan	- 0,448	0,008	Signifikan
2	2024	PDRB Perkapita Pengangguran	- 0,274	0,117	Tidak Signifikan
		PDRB Perkapita Kesehatan	- -0,446	0,008	Signifikan

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2026

#### **Ketimpangan Pembangunan Wilayah dari Sisi Pendapatan Tahun 2015, 2020, dan 2024**

Ketimpangan pembangunan wilayah dari sisi pendapatan menunjukkan dinamika yang berbeda sebelum, saat, dan setelah pandemi. Pada tahun 2015 nilai ketimpangan sebesar 0,7656, kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi antarwilayah belum merata, di mana provinsi dengan basis industri, perdagangan, dan sumber daya alam yang kuat memiliki tingkat pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi yang masih bergantung pendapatan pada sektor primer dan memiliki keterbatasan infrastruktur. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Akita, 2010) yang menyatakan bahwa ketimpangan regional di Indonesia bersifat persisten.

Pada tahun 2020, ketimpangan secara relatif menurun menjadi 0,7467, Penurunan tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan membaiknya pemerataan pembangunan, tetapi lebih disebabkan oleh dampak pandemi yang berbeda antarwilayah. Wilayah maju yang didominasi sektor industri, perdagangan, dan jasa mengalami perlambatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan daerah yang bertumpu pada sektor primer. Temuan ini didukung oleh (Suryahadi, 2022) yang menunjukkan bahwa pandemi memperbesar kesenjangan antarwilayah.

Selanjutnya, pada tahun 2024 ketimpangan kembali menurun menjadi 0,7383, namun kesenjangan pendapatan antarprovinsi masih tetap besar. Pemulihan ekonomi berlangsung lebih cepat pada wilayah dengan infrastruktur, investasi, dan kapasitas ekonomi yang lebih baik dibandingkan daerah yang masih bergantung pada sektor tradisional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *uneven recovery*, di mana pertumbuhan ekonomi belum diikuti oleh pemerataan pembangunan antarwilayah. Kondisi ini sejalan dengan penelitian (Wulandari, 2023) dan (Thoyyibah, 2025) yang menyatakan bahwa pemulihan ekonomi cenderung memperbesar kesenjangan antar daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah dari sisi pendapatan masih terjadi pada tahun 2015, 2020, dan 2024, sehingga hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) diterima. Temuan ini juga mendukung teori

kausalitas kumulatif Myrdal yang menjelaskan bahwa pembangunan cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang telah maju melalui mekanisme backwash effect, sedangkan spread effect belum berlangsung secara optimal. Akibatnya, wilayah dengan infrastruktur, investasi, dan aktivitas ekonomi yang lebih maju terus berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah tertinggal, sehingga ketimpangan regional di Indonesia masih tetap bertahan sebelum, saat, maupun setelah pandemi COVID-19.

### **Ketimpangan Pembangunan Manusia dari Sisi Pendidikan, Pengangguran, dan Kesehatan Tahun 2015, 2020, dan 2024**

Ketimpangan pembangunan manusia menunjukkan dinamika berbeda pada setiap indikator. Pada tahun 2015, ketimpangan pendidikan dengan nilai ketimpangan sebesar 0,1047, pengangguran dengan nilai ketimpangan sebesar 0,3433, dan kesehatan dengan nilai ketimpangan sebesar 0,2112, yang mencerminkan perbedaan akses layanan antar wilayah. Kondisi ini sejalan dengan (Akita, 2010) yang menyatakan bahwa ketimpangan tidak hanya terjadi pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial.

Pada tahun 2020, ketimpangan pendidikan menurun menjadi 0,0903 dan pengangguran menjadi 0,3167, menunjukkan variasi antar wilayah relatif mengecil, sementara kesehatan meningkat menjadi 0,2178 akibat perbedaan kapasitas sistem pelayanan kesehatan, tenaga medis, dan infrastruktur kesehatan di masing-masing daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pandemi memberikan dampak yang tidak merata (asymmetric shock) terhadap pembangunan manusia. Hal ini didukung oleh (Akita, 2022) dan (Indrawati, 2022) yang menyatakan bahwa pandemi memperlebar kesenjangan terutama pada sektor kesehatan.

Pada tahun 2024, ketimpangan pendidikan kembali menurun menjadi 0,0784 dan pengangguran menjadi 0,2863, sedangkan kesehatan meningkat menjadi 0,2298, yang menunjukkan bahwa pemulihan sektor kesehatan belum berlangsung merata. Wilayah dengan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan kapasitas fiskal yang lebih baik cenderung pulih lebih cepat dibandingkan daerah yang masih memiliki keterbatasan layanan kesehatan. Temuan ini sejalan dengan (Agustina, 2023) yang menyatakan bahwa pemulihan sektor kesehatan masih menghadapi kesenjangan antar daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan manusia masih terjadi pada tahun 2015, 2020, dan 2024, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Ketimpangan relatif lebih tinggi pada indikator pengangguran dan kesehatan dibandingkan pendidikan. Temuan ini mendukung teori kausalitas kumulatif Myrdal yang menjelaskan bahwa pembangunan cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang telah maju melalui mekanisme backwash effect, sementara spread effect belum berjalan optimal. Akibatnya, daerah dengan kapasitas fiskal, infrastruktur, dan pelayanan publik yang lebih baik terus mengalami peningkatan kualitas pembangunan manusia lebih cepat dibandingkan wilayah tertinggal, sehingga ketimpangan pembangunan manusia masih bersifat persisten di Indonesia. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Thoyyibah, 2025) yang menyatakan bahwa ketimpangan antarwilayah di Indonesia bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi serta kapasitas pembangunan masing-masing daerah.

### **Hubungan dan Perbedaan Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Pembangunan Manusia Sebelum dan Sesudah Pandemi**

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon dan korelasi Spearman, ketimpangan pembangunan di Indonesia menunjukkan perubahan signifikan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Pada ketimpangan pendapatan, pandemi menimbulkan dampak yang tidak merata (asymmetric impact), di mana wilayah dengan sektor jasa dan industri terdampak lebih besar dibanding daerah berbasis sektor primer. Pascapandemi, pemulihan ekonomi yang tidak

merata (uneven recovery) menyebabkan kesenjangan antarwilayah tetap meningkat. Temuan ini sejalan dengan (Akita, 2022) dan (Suryahadi, 2022)

Pada ketimpangan pendidikan, pandemi mengubah pola pemerataan akibat perbedaan akses teknologi dan kesiapan pembelajaran daring, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas jangka panjang. Hal ini didukung oleh (Cindy, 2024). Sementara itu, pada pengangguran, perbedaan struktur ekonomi menyebabkan tekanan dan pemulihan pasar kerja yang tidak merata antarwilayah, sebagaimana dijelaskan oleh (Indrawati, 2022). Pada sektor kesehatan, pandemi memperlihatkan secara jelas disparitas kapasitas layanan antar daerah, di mana wilayah dengan fasilitas lebih baik mampu pulih lebih cepat, sejalan dengan (Rahmawati, 2024).

Selain itu, sebelum pandemi hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pembangunan manusia masih lemah dan tidak signifikan, menunjukkan peran kebijakan pemerintah dalam pemerataan. Namun setelah pandemi, hubungan tersebut menjadi lebih kuat terutama pada pendidikan (positif signifikan) dan kesehatan (negatif signifikan), yang menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi daerah semakin menentukan kualitas pembangunan manusia. Temuan ini didukung oleh (Arsyad, 2020). Sementara itu, hubungan dengan pengangguran tetap tidak signifikan karena dipengaruhi faktor lain seperti struktur ekonomi dan kualitas tenaga kerja (Yuliana, 2023).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan perubahan hubungan antara ketimpangan pembangunan wilayah dan pembangunan manusia sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, sehingga hipotesis penelitian diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa pandemi tidak hanya mengubah kondisi ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat peran kapasitas ekonomi daerah dalam menentukan kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pascapandemi perlu diarahkan pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan layanan kesehatan agar kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat dikurangi

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah dan pembangunan manusia di Indonesia mengalami dinamika yang berbeda sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19. Ketimpangan pendapatan antar provinsi secara relatif menunjukkan penurunan nilai koefisien variasi. Namun demikian, kesenjangan absolut justru cenderung meningkat, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum diikuti dengan pemerataan antar wilayah. Pada aspek pembangunan manusia, indikator pendidikan dan pengangguran menunjukkan kecenderungan penurunan ketimpangan, sedangkan indikator kesehatan justru mengalami peningkatan ketimpangan, terutama akibat perbedaan kapasitas layanan kesehatan antar daerah.

Hasil uji inferensial menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah pandemi pada seluruh variabel yang diteliti. Selain itu, hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pembangunan manusia yang sebelumnya lemah menjadi lebih kuat setelah pandemi, khususnya pada indikator pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi daerah semakin berperan dalam menentukan kualitas pembangunan manusia. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis tingkat ketimpangan, perbedaannya sebelum dan sesudah pandemi, serta hubungan antara pembangunan wilayah dan pembangunan manusia telah tercapai.

Penelitian ini memiliki kelebihan dalam mengintegrasikan analisis ketimpangan ekonomi dan pembangunan manusia secara simultan serta membandingkan kondisi lintas waktu sebelum

dan sesudah pandemi. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yaitu penggunaan data yang terbatas pada tiga periode waktu serta belum memasukkan variabel lain seperti investasi, infrastruktur, dan kebijakan fiskal daerah yang berpotensi memengaruhi ketimpangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data panel dengan periode waktu yang lebih panjang serta menambahkan variabel yang lebih komprehensif agar mampu memberikan analisis yang lebih mendalam.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, R. (2023). Health system resilience and inequality in Indonesia after COVID-19. *The Lancet Regional Health – Southeast Asia*, 12, 100156.
- Akita, T. , & K. M. (2022). Regional inequality in Indonesia: Measurement using coefficient of variation squared. *Journal of Regional Development Studies*, 15(2), 45–61.
- Akita, T. , & L. R. A. (2015). Human development inequality across regions in Indonesia. *Asian Economic Journal*, 29(3), 233–250.
- Akita, T. , & M. S. (2010). Regional income inequality in Indonesia: A panel data analysis. *Economics Bulletin*, 30(2), 1125–1136.
- Arsyad, L. (2020). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Cindy, R. , N. A. , & S. D. (2024). Educational inequality in Indonesia during and after the COVID-19 pandemic. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 9(1), 45–59.
- Indrawati, S. M. (2022). Fiscal policy response to COVID-19 and its impact on inequality in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(3), 321–344.
- Rahmawati, N. , P. H. , & L. S. (2024). Health service disparities across provinces in Indonesia after the pandemic. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 18(3), 201–214.
- Suryahadi, A. , A. I. R. , & S. D. (2022). The impact of COVID-19 on poverty and inequality in Indonesia. *SMERU Research Institute Working Paper*.
- Syaifullah, D. R. , & S. D. M. (2025). Ketimpangan kualitas sumber daya manusia antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Statistik Dan Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 33–47.
- Thoyyibah, M. , W. A. Z. , H. Z. , & P. R. F. (2025). Analisis ketimpangan regional di Jawa Barat menggunakan indeks Williamson dan koefisien variasi. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 10(1), 1–15.
- Wulandari, P. (2023). Regional economic recovery and inequality after the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 24(1), 45–60.
- Yuliana, F. , S. D. , & M. A. (2023). Economic growth and unemployment mismatch across Indonesian provinces after COVID-19 recovery. *Jurnal Ekonomi Nasional*, 11(4), 250–267.